

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Efektivitas Anggaran sebagai Variabel Intervening pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

M. Ramadhan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

e-mail: mr0633760@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the Influence of Accountability and Transparency on Budget Performance and Budget Effectiveness as intervening variables at Sultan Suriansyah Hospital Banjarmasin City. The population in this study were 38 employees at Sultan Suriansyah Hospital Banjarmasin City, data was taken from questionnaires distributed to respondents. Data were analyzed using SmartPLS Version 3. The results of this study are Accountability has a positive and significant effect on Budget Effectiveness, Transparency has a positive and significant effect on Budget Effectiveness, Accountability has a positive and significant effect on Budget Performance, Transparency has a positive and significant effect on Budget Performance, Budget Effectiveness has a positive and significant effect on Budget Performance, Budget Effectiveness mediates the effect of Accountability on Budget Performance, Budget Effectiveness mediates the effect of Transparency on Budget Performance at Sultan Suriansyah Hospital Banjarmasin City

Keywords: *Accountability, Transparency, Budget Effectiveness, Budget Performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dan Efektivitas Anggaran sebagai variabel intervening pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin. Populasi dalam penelitian ini ialah 38 pegawai pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan SmartPLS Versi 3. Hasil penelitian ini ialah Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran, Efektivitas Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran, Efektivitas Anggaran memediasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran, Efektivitas Anggaran memediasi pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Anggaran, Kinerja Anggaran

©2025 Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional, dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Kemudian Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal dan menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah

Adanya kewajiban Pemerintah, baik di Pusat dan Daerah, untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*) menyebabkan Pemerintah berupaya untuk selalu menyajikan kinerja anggaran yang baik dan mampu dipertanggungjawabkan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Keuangan sebagai salah satu hal yang dituntut untuk transparan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memiliki nilai tertentu dalam laporan sebagai ukuran dan informasi sejauh mana kinerja keuangan pemerintahan berjalan layak dan semestinya. Nilai informasi laporan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2016).

Menurut Halim (2018:83), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Transparansi keuangan menurut Widyaningsih (2018) adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yaitu belum optimalnya penetakerjaan dokumen perencanaan yang belum memperoleh nilai yang diharapkan dan belum memenuhi ekspektasi serta dimana anggaran yang harusnya digunakan untuk melaksanakan perencanaan harus tertunda karena harus digunakan untuk anggaran covid, sehingga biaya akuntabilitas dan operasi sistem lebih besar dibandingkan dengan manfaat potensial.

Untuk meningkatkan transparansi RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin terus mengembangkan sistem elektronifikasi transaksi. Ini harus dilaksanakan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Aplikasi yang sudah dibuat digunakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.

Efektivitas Anggaran Pemerintahan pada saat ini mengalami penurunan karena anggaran banyak dipergunakan untuk penanganan dampak Covid 19 sehingga kinerja anggaran belum maksimal dan dianggap belum akuntabel dan transparan.

Dalam menjaga Kinerja Anggaran, seorang Kepala Dinas dari RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin harus memiliki ilmu, wawasan dan pemahaman yang cukup di bidang substansi yang di pimpinnya. RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin diharapkan menindaklanjuti perjanjian kinerja yang sudah dibuat sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik - baiknya serta transparan dalam pengambilan kebijakan sehingga kemudian melahirkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Syafira Khairunnisa, 2018, yang menyatakan bahwa akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Makasar, sedangkan penelitian Tara Indira, 2017, menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja, namun transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran. Begitupula dengan penelitian Chalid Meidy, 2016, yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi efektivitas anggaran, namun mempengaruhi kinerja.

Penelitian atas variabel transparansi pernah diteliti oleh Endang Kusuma, 2017, mengatakan bahwa transparansi mempengaruhi kinerja anggaran, namun penelitian Indira Tisya, 2020, mengatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Penelitian serupa juga telah dilakukan Tessa Affandi, 2018, yang mengatakan bahwa efektivitas anggaran mempengaruhi kinerja anggaran instansi pemerintahan. Maya Alfia, 2012, melalui penelitiannya tidak sependapat, dimana Maya Alfia menyatakan bahwa efektifitas anggaran belum mampu mempengaruhi kinerja anggaran.

LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan

Manajer Keuangan memegang peranan yang sangat penting. Dalam perkembangannya, tugas Manajer Keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan dan mencari dana. Manajer Keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah.

Menurut Peter (2018:1), Manajemen Keuangan Perusahaan adalah salah satu bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Dengan kata lain manajemen keuangan perusahaan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Menurut Utari (2018:1).

Manajemen Keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Dari teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Keuangan merupakan usaha pengelolaan dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan tersebut (Harahap, 2018).

1. Fungsi Manajemen Keuangan

Tugas utama Manajemen Keuangan adalah mengambil keputusan yang mencakup perusahaan dalam memperoleh dana dan juga cara mengalokasikan dana tersebut. Dari pengertian tersebut, ada fungsi manajemen keuangan (Harahap, 2018) yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana (Keputusan Investasi)
- b. Memperoleh Dana (keputusan pendanaan)
- c. Pembagian laba (kebijakan dividen)

Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan. Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya keputusan pendanaan dan kebijakan dividen akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan. Apabila hanya memperhatikan dana yang tertanam dalam jangka waktu yang lama, maka perbandingan tersebut sebagai struktur modal. Apabila diperhatikan baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang, perbandingan disebut sebagai struktur finansial. Keputusan pendanaan dan kebijakan dividen mempengaruhi kedua struktur tersebut.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan Manajemen Keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian yang dilakukan oleh Manajer Keuangan. Untuk mempertahankan keberlangsungan operasional perusahaan, banyak keputusan keuangan yang perlu diambil oleh Manajer Keuangan. Keputusan keuangan dapat diambil dengan benar apabila hal tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Secara umum tujuan manajemen keuangan dalam jangka pendek adalah menghasilkan laba yang optimal. Agar para pemilik dapat menerima return yang lebih besar dari investasi yang dilakukan perusahaan selama kegiatan operasionalnya. Namun secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. (Harahap, 2018)

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti. Hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti : yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, Auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi.

Menurut Dwi Martani, 2017, Laporan Keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Menurut Budi Setiyono, 2018, *Accountability* adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility* dan *terminology* lain yang berkaitan dengan "*the expectation of account-giving*" (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian *accountability* mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat.

Laporan Auditor adalah semacam surat perantara (*medium*) melalui bagaimana auditor menyatakan opininya (pendapat) atau jika keadaan mengharuskan menolak berpendapat tentang laporan yang diauditnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti auditor bertanggungjawab terhadap pendapat atau opininya.

Tujuan audit umum atas laporan keuangan klien oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor mengumpulkan bahan bukti untuk memverifikasi dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar.

Dalam bidang ilmu akuntansi, Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Dalam pasal 7 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut UNDP, Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

1. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsif pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan,
2. Penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas semua hasil pekerjaan yang ditanggungkan kepadanya. Bagus atau buruknya hasil pekerjaan yang telah diselesaikan seseorang, jika ia mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat disalahkan maka pekerja tersebut telah bersikap akuntabel

Menurut Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018, Indikator Akuntabilitas, terdiri dari:

- a. Tanggung Jawab
- b. Jujur
- c. Kejelasan Target
- d. Netral
- e. Mendahulukan kepentingan umum (publik)
- f. Adil dan merata
- g. Transparan
- h. Konsisten dan dapat diandalkan
- i. Partisipatif.

Transparansi

Konsep Transparansi

Dalam *Good Governance*, Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-Undangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Beberapa manfaat penting dengan adanya Transparansi Anggaran menurut Andrianto (2017) yaitu :

- a. Mencegah korupsi;
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu;
- e. Memperkuat kohesi karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewangannya.

1. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Terbuka.
Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.
Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat. Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrebang) melibatkan masyarakat.
- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa. Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

2. Indikator Transparansi

Menurut Dian (2017: 17), indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan informasi yang jelas.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Dian (2017: 16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu :

- a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
- b. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- c. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.
- d. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
- e. Pertemuan masyarakat
- f. Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara men-tranparansi-kan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri.

Efektivitas Anggaran

1. Pengertian Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Anthony (2019 : 203) dalam bukunya Sistem Informasi mendefinisikan Efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapainya.” Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Menurut pendapat Arrens (2018 : 817) dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu mendefinisikan Efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah menilai apakah suatu lembaga atau organisasi telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam mencapai standar kelayakan yang mengacu kepada pencapaian suatu tujuan”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dimana suatu perusahaan dapat diartikan telah dioperasikan secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya tujuan yang jelas,
 - b. Struktur organisasi,
 - c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
 - d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

3. Pengertian Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Nilai suatu anggaran tergantung pada perencanaan dan pengendalian anggaran, apabila terjadi penyimpangan atas pelaksanaan anggaran dikarenakan terlalu tinggi dalam penetapannya, maka diperlukan cara untuk mengendalikannya yaitu dengan cara meninjau kembali hasil penetapan anggaran sebelumnya sehingga pada saat pelaksanaan dapat terwujud dengan baik serta dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran tersebut sehingga pada periode yang akan datang dapat dijadikan sebagai perbaikan yang positif. Anggaran juga merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh laba dengan memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen sehingga perusahaan memperoleh penghasilan yang optimal. Anggaran atau lebih sering disebut sebagai “ budget “ mempunyai definisi yang beragam, namun apabila dicermati lebih teliti masing-masing definisi tersebut mempunyai definisi yang sama.

Pengertian Anggaran menurut M. Nafarin (2017 : 9) dalam bukunya yang berjudul Anggaran Perusahaan, yaitu: “Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan”. Sedangkan menurut Darsono dan Ari Purwanti (2018:1) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen terdapat beberapa macam pengertian tentang anggaran antara lain sebagai berikut :

- a. Anggaran dapat berupa anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran lazim disebut rencana kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk angka-angka keuangan, lazim disebut anggaran formal.
- b. Anggaran lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba, yaitu proses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif.
- c. Anggaran ialah suatu perencanaan laba strategis jangka panjang, suatu perencanaan taktis laba jangka pendek; suatu sistem akuntansi berdasarkan tanggungjawab; suatu penggunaan prinsip pengecualian yang berkesinambungan, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.
- d. Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pada umumnya disusun secara tertulis.
- e. Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang memiliki kekhususan tersendiri atau sebagai sub-sistem yang memerlukan hubungan dengan subsistem lain yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.
- f. Anggaran dianggap sebagai yang otonom karena mempunyai sasaran serta cara-cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan yang berbeda dengan sasaran serta cara kerja sistem lain yang ada dalam perusahaan; anggaran sekaligus juga disebut su-sistem.
- g. Anggaran sebagai suatu system terdiri dari tiga lapisan yaitu : inti system, sub-sistem penunjang dan sub-sistem lingkungan. Inti system ialah sasaran laba; sub-sistem penunjang ialah berbagai aktivitas yang membantu kelancaran kerjanya inti system seperti struktur organisasi, administrasi, analisis data, angka-angka standard dan sebagainya. Sub-sistem lingkungan ialah lingkungan eksternal organisasi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya yang mempengaruhi bekerja suatu sistem organisasi.
- h. Anggaran atau budget adalah sama dengan profit planning. Perencanaan laba meliputi : perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan penggunaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja langsung, perencanaan biaya overhead, perencanaan biaya pemasaran, perencanaan biaya umum dan admistrasi dan seterusnya. Modal tersebut pada umumnya disebut anggaran berkala yang lengkap atau master budget.” Selain itu menurut Tendi Haruman (2017 : 3) dalam bukunya yang berjudul Sistem

Akuntansi, menjelaskan anggaran sebagai berikut: “Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun” Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terperinci dalam bentuk kuantitas dan dalam suatu periode tertentu.

4. Kegunaan Anggaran

Adapun kegunaan pokok anggaran menurut Tia Ariana, (2017), yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memiliki sumber dan penggunaan dana.
- b. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- c. Untuk mengadakan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- d. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan lebih terlihat.
- f. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.
- g. Karakteristik Anggaran Karakteristik

Anggaran menurut oleh Robert (2018 : 1) yaitu:

- a. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit usaha.
- b. Dinyatakan dalam unit moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non moneter.
- c. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
- d. Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dari anggaran.
- e. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran.
- f. Sekali setuju anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
- g. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan.”

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Selain itu, anggaran berisi komitmen manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab agar mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

5. Manfaat dan Tujuan Anggaran Manfaat anggaran menurut Tya Ariana, (2019:31), diantaranya :

- a. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- b. Dapat memotivasi pegawai.
- c. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
- d. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- e. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- f. Alat pendidikan bagi para manajer.

Maka dapat dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja atau kurang sukses dari perbandingan dan analisis dapat diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui pula kelemahan-kelemahan dan keunggulan yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (anggaran) selanjutnya secara lebih akurat.

6. Keunggulan dan Kelemahan Anggaran

Menurut Tendi Haruman & Sri Rahayu (2017:8) keunggulan yang dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik, antara lain :

- a. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan.
- b. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut.
- c. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.
- d. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian

- pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan.
- e. Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta (*sense of participation*).
Di samping beberapa keunggulan tersebut di atas, terdapat pula beberapa kelamahan antara lain :
 - a. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut.
 - b. Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
 - c. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya.
 - d. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes.
7. Indikator Efektivitas Anggaran
- Indikator Efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani dan Ahmad Wito Subagyo (2018) dengan indikator Efektivitas Anggaran yaitu,
- a. Ketepatan sasaran anggaran
 - b. Sosialisasi anggaran
 - c. Tujuan anggaran
 - d. Pemantauan anggaran
 - e. Ketepatan penggunaan dana
 - f. Pengembalian dana

Kinerja Anggaran

1. Pengertian Kinerja Anggaran

Kemenkeu (2018) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja Negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Mahmudi (2018) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Menurut Halim dan Kusufi (2018), anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional dan anggaran kinerja menekankan pada konsep value for money.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam indikator Value for Money terdapat konsep yang dikenal dengan 3E yaitu sebagai berikut :

- a. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan *masukan (cash of input)*. Dalam pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan.
- b. Efisiensi, sangat berhubungan erat dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.
- c. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Nordiawan (2018) terdapat beberapa karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi dan rincian belanja.
- b. Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan standar biaya.
- c. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.

Bastian (2018) menjelaskan bahwa setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja ternyata memiliki keunggulan, yaitu meliputi :

- a. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.
- b. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
- c. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan.
- d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja.

e. Menghindarkan pemborosan.

Menurut Kementerian Keuangan (2016) ruang lingkup di dalam penganggaran berbasis kinerja dibagi dalam beberapa lingkup, yaitu sebagai berikut :

- a. Menentukan visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), tujuan, sasaran, dan target Dalam penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik.
- b. Menentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi).

Menurut Kemenkeu (2015) indikator kinerja meliputi:

- a. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
- b. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
- c. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin
- d. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
- e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal *direvolving* satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.
- f. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
- g. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
- h. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
- i. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
- j. Konfirmasi Capaian *Output*, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran
- k. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
- l. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
- m. Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program dalam kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas.

Analisa Standar Biaya (ASB) ASB merupakan standar biaya suatu program atau kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun ABK perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBN atau APBD, dan penggunaan ASB. Dalam menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarnya. Menurut Yuwono, Indrajaya, dan Hariyandi (2018) terdapat persyaratan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dengan baik di lembaga pemerintah daerah yaitu:

- a. Pertama, keterlibatan DPRD dalam perencanaan anggaran karena DPRD merupakan wakil dari masyarakat sehingga dalam proses perencanaan anggaran harus dilibatkan agar menimbulkan konsekuensi DPRD yang harus proaktif dan dapat menetapkan dua pokok hal yaitu arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD.

- b. Kedua, adanya desentralisasi wewenang hingga ke level unit kerja sebagai pusat pertanggungjawaban. Dalam hal ini anggaran digunakan untuk alokasi sejumlah dana kepada unit kerja untuk mengelola sumber dana yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Penerapan serta jelas tujuan dan sasaran, hasil, dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Hipotesis diterima, hal tersebut dibuktikan dari P Value yang kurang dari 0.05 yaitu $0.000 < 0.05$ dan memiliki original sampel positif sebesar 0.426

Permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yaitu belum optimalnya penetakerjaan dokumen perencanaan yang belum memperoleh nilai yang diharapkan dan belum memenuhi ekspektasi serta dimana anggaran yang harusnya digunakan untuk melaksanakan perencanaan harus tertunda karena harus digunakan untuk anggaran covid, sehingga biaya akuntabilitas dan operasi sistem lebih besar dibandingkan dengan manfaat potensial.

Maka ada baiknya pegawai memiliki Tanggung Jawab yang tinggi, Jujur dalam melaksanakan pekerjaan, memiliki Target yang jelas, Netral dalam bekerja, Mendahulukan kepentingan umum (publik), Adil dan merata saat bekerja, melakuka pekerjaan dengan Transparan, Konsisten dan dapat diandalkan dan partisipatif.

Sesuai dengan teori Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Risman Nur Fauzi, 2019, yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap efektivitas anggaran.

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Hipotesis diterima, hal tersebut dibuktikan dari P Value yang kurang dari 0.05 yaitu $0.000 < 0.05$ dan memiliki original sampel positif sebesar 0.504

Fenomena yang terjadi pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin ialah dimana pimpinan selalu mengedukasi Untuk meningkatkan transparansi RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin terus mengembangkan sistem elektronifikasi transaksi. Ini harus dilaksanakan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Aplikasi yang sudah dibuat digunakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.

Maka seharusnya RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin dapat melakukan Penyediaan informasi yang jelas, mudah dalam mengakses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, bekerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Sesuai dengan teori Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmani, 2018, yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas anggaran.

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Hipotesis diterima hal tersebut dibuktikan dari P Value yang kurang dari 0.05 yaitu $0.017 < 0.05$ dan memiliki original sampel positif sebesar 0.086

Permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yaitu belum optimalnya penetakerjaan dokumen perencanaan yang belum

memperoleh nilai yang diharapkan dan belum memenuhi ekspektasi serta dimana anggaran yang harusnya digunakan untuk melaksanakan perencanaan harus tertunda karena harus digunakan untuk anggaran covid, sehingga biaya akuntabilitas dan operasi sistem lebih besar dibandingkan dengan manfaat potensial.

Maka ada baiknya pegawai memiliki Tanggung Jawab yang tinggi, Jujur dalam melaksanakan pekerjaan, memiliki Target yang jelas, Netral dalam bekerja, Mendahulukan kepentingan umum (publik), Adil dan merata saat bekerja, melakukan pekerjaan dengan Transparan, Konsisten dan dapat diandalkan dan partisipatif.

Sesuai dengan teori Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cakra, 2016 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Hipotesis diterima hal tersebut dibuktikan dari P Value yang kurang dari 0.05 yaitu $0.000 < 0.05$ dan memiliki original sampel positif sebesar 0.860

Fenomena yang terjadi pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin ialah dimana pimpinan selalu mengedukasi Untuk meningkatkan transparansi RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin terus mengembangkan sistem elektronifikasi transaksi. Ini harus dilaksanakan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Aplikasi yang sudah dibuat digunakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.

Maka seharusnya RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin dapat melakukan Penyediaan informasi yang jelas, mudah dalam mengakses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, bekerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Sesuai dengan teori Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmani, 2018, yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Efektivitas Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Hipotesis diterima hal tersebut dibuktikan dari P Value yang kurang dari 0.05 yaitu $0.022 < 0.05$ dan memiliki original sampel positif sebesar 0.075

Efektivitas Anggaran Pemerintahan pada saat ini mengalami penurunan karena anggaran banyak dipergunakan untuk penanganan dampak Covid 19 sehingga kinerja anggaran belum maksimal dan dianggap belum akuntabel dan transparan.

Keefektifitasan anggaran dapat dilihat dari keefektifitasan anggaran dapat diukur dari bagaimana Ketepatan sasaran anggaran, keefektifitasan anggaran dapat diukur dari bagaimana Sosialisasi anggaran yang dilakukan, keefektifitasan anggaran dapat diukur dari bagaimana Tujuan anggaran yang dicapai, keefektifitasan anggaran dapat diukur dari bagaimana Pemantauan anggaran yang ditargetkan, keefektifitasan anggaran dapat diukur dari bagaimana Ketepatan penggunaan dana yang dianggarkan, keefektifitasan anggaran dapat diukur dari bagaimana Pengembalian dana yang berlebih

Sesuai dengan teori Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Salsabila Andriane, 2013, yang menyatakan bahwa efektivitas anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Efektivitas Anggaran memediasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Hipotesis diterima dibuktikan dari p value yang memiliki nilai lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.033 < 0.05$ dan original sampel yang positif yaitu sebesar 0.032, namun pengaruh langsung memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung dilihat dari original sampel yang lebih besar pengaruh langsung

dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0.032 < 0.086$ dan t statistic pengaruh langsung yang lebih besar yaitu $2.138 < 2.391$.

Permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yaitu belum optimalnya penetakerjaan dokumen perencanaan yang belum memperoleh nilai yang diharapkan dan belum memenuhi ekspektasi serta dimana anggaran yang harusnya digunakan untuk melaksanakan perencanaan harus tertunda karena harus digunakan untuk anggaran covid, sehingga biaya akuntabilitas dan operasi sistem lebih besar dibandingkan dengan manfaat potensial.

Maka ada baiknya pegawai memiliki Tanggung Jawab yang tinggi, Jujur dalam melaksanakan pekerjaan, memiliki Target yang jelas, Netral dalam bekerja, Mendahulukan kepentingan umum (publik), Adil dan merata saat bekerja, melakukan pekerjaan dengan Transparan, Konsisten dan dapat diandalkan dan partisipatif.

Sesuai dengan teori Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban.

Efektivitas Anggaran memediasi pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

Hipotesis diterima dibuktikan dari p value yang memiliki nilai lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.043 < 0.05$ dan original sampel yang positif yaitu sebesar 0.038, namun pengaruh langsung memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung dilihat dari original sampel yang lebih besar pengaruh langsung dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0.038 < 0.860$ dan t statistic pengaruh langsung yang lebih besar yaitu $2.033 < 37.889$.

Fenomena yang terjadi pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin ialah dimana pimpinan selalu mendukung Untuk meningkatkan transparansi RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin terus mengembangkan sistem elektronifikasi transaksi. Ini harus dilaksanakan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Aplikasi yang sudah dibuat digunakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.

Maka seharusnya RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin dapat melakukan Penyediaan informasi yang jelas, mudah dalam mengakses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, bekerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Sesuai dengan teori Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
4. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
5. Efektivitas Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
6. Efektivitas Anggaran memediasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
7. Efektivitas Anggaran memediasi pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pegawai dapat memiliki akuntabilitas yang lebih baik dengan mencontoh sikap akuntabilitas, Menentukan hasil dan harapan (sebelum ada kejadian merugikan), Berkomitmen penuh, Terbuka dalam

- mendapatkan feedback dan memecahkan masalah tanpa mencari kesalahan, Mempekerjakan karyawan yang memiliki akuntabilitas.
2. Sebaiknya pimpinan mengedukasi pegawai agar memiliki sikap transparansi yaitu menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, sehingga seluruh Pemangku Kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan Perusahaan.
 3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mampu mengembangkan atas apa yang telah diteliti dalam penelitian ini agar dapat menjadi suatu pembaruan atas akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arja Sadjiarto. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 138–50.
- Adiwirya. M. F. I.P Sudana. (2017). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2), 611-628.
- Arifianti. H., Payamta., Sutaryo. (2018). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi Xvi. Manado, 25-28 September 2018.*
- Ardila, I. (2017). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 23-50.
- Alpi, M. Firza. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan 1(1)*,355–64.
- Bastian, i. (2018). Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar. Jakarta: Erlangga Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–47.
- Dri Asmawanti S, Aisyah Mayang Sari, Vika Fitranita, and Indah Oktari Wijayanti. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94.
- Garung, Christa Yunnita, and Linda Lomi ga. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (add) dalam pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Lucy Auditya, Husaini, and Lismawat. (2018). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*,3(1), 21–41.
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya, and I Putu Sudana. (2017). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,2(11), 611–28.
- Mardiyati, and Wahyudi Hijrah. (2018). Penerapan Prinsip GCG (Transparansi & Akuntabilitas) Dalam Kerangka Laporan Keuangan Kelompok Pemodal 13 Di Pontianak Timur. *JurnalEkonomi STIEP* 3(2), 24–30.
- Nanik Ermawati, and Nurul Rizka Arumsari. (2020). Determinan Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus. *Akuntansi dan Manajemen*, 9(1), 63–84.
- Ramdhani, Dadan, and Indi Zaenur Anisa. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
- Rialdy, Novien, M. Firza Alpi, Nadia Ika Purnama, and Januri. (2021). Model Pengukuran Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan : Pendekatan Partial Least Squares (PLS) - SEM Analisis. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(02), 432–42. doi: 10.29040/jap.v21i02.1514.
- Suci Muthi"ah. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintah Kabupaten Magetan dan Ngawi. *Ulum*, I.(2018). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Wulandari, Ferida Ovy. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar) Disusun.
- Yuyun Novita Sari. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan).
- Yuwono. (2018). *Penganggaran Sektor Publik*. Bandung: BayuMedia Publishing.